

**DIPLOMASI SEBAGAI STRATEGI PERJUANGAN  
MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN PADA  
MASA KABINET SYAHRIR**

**SKRIPSI**



Oleh :

*Kurniati Agustinah*

NIM : 9102105235

**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
DESEMBER 1998

Class  
32302  
Agus  
d  
18/10  
1998  
19 FEB 1998  
PT 199. 6681 18/10

MOTTO :

فِيهَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ تَ لَوْ كُنْتُمْ فَرِحْتُمْ بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَتَأْتِيََنَّكُمْ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  
مَنْ حَوَّلَكَ مُعَاوِذٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (العمران ١٥٩)

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, dan bermusyawarahlah baik dalam urusan peperangan maupun hal-hal di antara lainnya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (M. Said, 1991 : 64).

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. mamiku Moh. Syaifuddin
2. kedua orang tuaku Bapak Sardiman Sastromihardjo dan Ibu Siti Patimah
3. semua guru-guruku
4. semua teman-temanku
5. semua mater yang selalu membanggakan



DIPLOMASI SEBAGAI STRATEGI PERJUANGAN  
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN PADA  
MASA KABINET SYAHRIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dengan Spesialisasi Program Pendidikan Sejarah Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Oleh :

Nama : Kurniati Agustinah  
NIM : 9102105235  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Angkatan Tahun : 1991  
Daerah Asal : Banyuwangi  
Tempat & Tgl. Lahir : Banyuwangi, 17 Agustus 1972

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Choemael Hadi

NIP. 130 145 576

  
Dr. Rudiyo


NIP. 131 577 290

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Jember sebagai skripsi.

Pada hari : Selasa  
Tanggal : 22 Desember 1998  
Tempat : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua

  
Dr. Soekemi

NIP. 130 341 207

Sekretaris

  
Dr. Sutjito

NIP. 131 577 287

Anggota :

1. Dr. Sumarno

NIP. 131 403 352

2. Dr. H. Choemael Hadi

NIP. 130 145 576





Mengetahui

Dekan,

  
Dr. Soekardjo BW

NIP. 130 287 101



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat

1. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Ketua Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan semoga Allah yang Maha Esa berkenan memberikan petunjuk.

Jember, 22 Desember 1998

Penulis

## RINGKASAN

Kurniati Agustinah, Desember 1998, Diplomasi Sebagai Strategi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Pada Masa Kabinet Syahrir.

Skripsi, Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Pembimbing: (I) Drs. H. Choesnoel Hadi, (II) Drs. Budiyo.

Kata Kunci: Diplomasi; Strategi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Masa Kabinet Syahrir.

Strategi perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang dilaksanakan pada masa kabinet Syahrir bertujuan menghindari peperangan dan korban sia-sia. Strategi diplomasi ditempuh dengan mengadakan perundingan dengan Belanda, baik yang dilakukan di Indonesia, maupun di negeri Belanda, selain itu juga mengadakan bantuan beras ke India, dengan harapan memperoleh simpati dan pengakuan dunia internasional terhadap upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Berkaitan dengan judul yang diajukan, terdapat permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana pelaksanaan strategi diplomasi dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada masa kabinet Syahrir?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji secara jelas bagaimana pelaksanaan strategi diplomasi dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada masa kabinet Syahrir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Heuristik, yaitu kegiatan mengumpulkan sumber-sumber; (2) Kritik, yaitu kegiatan meneliti dan menilai sumber-sumber yang benar-benar diperlukan; (3) Interpretasi, yaitu kegiatan merangkai dan menghubungkan fakta-fakta; dan (4) Historiografi, yaitu menuliskan atau merekonstruksi berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

Metode yang penulis gunakan dalam menentukan tempat penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan tempat penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan datanya adalah metode Dokumenter yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode filosofik, yaitu cara berfikir teratur sehingga menghasilkan pengetahuan yang mendekati kebenaran dan masuk akal, yang dalam penerapannya menggunakan teknik logika komparatif, yaitu proses membanding-bandingkan data yang satu dengan yang lain, dan teknik logika induktif, yaitu cara berfikir berdasarkan pengetahuan khusus untuk disimpulkan menjadi fakta yang bersifat umum dan obyektif.

Kurun waktu yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini mulai bulan Februari 1996 sampai dengan bulan Juni 1997 dan bulan Agustus 1998 sampai

dengan bulan November 1998, mulai dari pengajuan judul, pengumpulan sumber, analisis data hingga penulisan laporan yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Laboratorium Sejarah (Kelamas) dan di rumah.

Akhir dari penulisan penelitian ini ditutup dengan kesimpulan, bahwa strategi yang telah dilakukan pada masa kabinet Syahrir meliputi; (1) mengadakan perundingan awal dengan Belanda dengan harapan agar kedua pihak dapat saling mendekati; (2) mengadakan perundingan Hooge Veluwe; (3) mengadakan perundingan Linggarjati; (4) mengadakan pengiriman bantuan beras ke India untuk membantu kelaparan.

Saran-saran yang penulis sampaikan adalah kepada: (1) mahasiswa calon guru sejarah, akan lebih baik jika mendalami materi sejarah sebagai bekal menjadi guru profesional dengan cara mengadakan penelitian sejarah; (2) para sejarawan, akan lebih baik jika penelitian mengenai sejarah Indonesia terus ditingkatkan, sehingga dapat diketahui secara optimal mengenai sejarah bangsa sendiri untuk lebih mempertebal rasa kebangsaan dalam menghadapi era globalisasi; (3) alma mater, agar terus mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian sejarah sebaik mungkin untuk menghasilkan calon guru sejarah yang berkualitas, dan menambah perpustakaan sebagai tanda bukti pelaksanaan dharma penelitian yang menjadi salah satu tugas Perguruan Tinggi; (4) generasi penerus, sebaiknya terus mempelajari Sejarah Nasional Indonesia agar dapat mengetahui perjuangan bangsa untuk dapat melanjutkan pada masa yang akan datang.





## DAFTAR ISI

8		
HALAMAN JUDUL .....		i
HALAMAN MOTTO .....		ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....		iii
HALAMAN PENGANTAR .....		iv
HALAMAN PENGESAHAN .....		v
KATA PENGANTAR .....		vi
RINGKASAN .....		vii
DAFTAR ISI .....		ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>		<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Pemilihan Permasalahan .....		1
1.2. Definisi Operasional Variabel .....		1
1.3. Ruang Lingkup Dan Rumusan Permasalahan .....		4
1.3.1. Ruang Lingkup Permasalahan .....		4
1.3.2. Rumusan Permasalahan .....		4
1.4. Tujuan Penelitian .....		5
1.5. Manfaat Penelitian .....		5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>6</b>
Pelaksanaan Strategi Diplomasi Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan Pada Masa Kabinet Syahrir .....		6
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>9</b>
3.1. Pengertian Metode Penelitian .....		9
3.2. Pengertian Metode Penelitian Sejarah .....		9
3.3. Metode Penentuan Tempat Penelitian .....		12
3.4. Metode Pengumpulan Data .....		13

3.5. Metode Analisis Data : Metode Filosofik .....	14
a. Logika Komparatif .....	15
b. Logika Induktif .....	15
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>16</b>
Peningkatan Strategi Diplomasi dalam Perjuangan Bangsa Indonesia	
Mempertahankan kemerdekaan Pada Masa kabinet Syahrir .....	16
1. Latar Belakang dilaksanakannya strategi Diplomasi .....	16
2. Langkah Pertama Syahrir sebelum Menjalankan Politik	
Diplomasi Dengan Belanda .....	20
2.1 Perubahan Status Komite Nasional Indonesia Pusat .....	20
2.2. Pendirian Partai-Partai Politik .....	21
2.3. Terbentuknya Kabinet Parlemen Pertama .....	23
3. Awal Perundingan Syahrir Dengan Belanda .....	24
4. Perundingan Hooge Veluwe .....	26
5. Perundingan Linggarjati .....	28
6. Pengiriman Berus Ke India .....	32
7. Akibat Dilaksanakannya Strategi Politik Diplomasi Dalam	
Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan	
Pada Masa Kabinet Syahrir .....	35
7.1. Jatuh Bangunnya Kabinet Syahrir .....	35
7.2. Bertambahnya Simpati Dan Pengakuan Kedaulatan Diri	
Negara Lain .....	38
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>42</b>
5.1. Kesimpulan .....	42
5.2. Saran-Saran .....	42

<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
1. <b>Matrik Penelitian .....</b>	<b>47</b>
2. <b>Pasal-Pasal Perundingan Linggarjati .....</b>	<b>48</b>
3. <b>Surat Keterangan Mengadakan Studi Literatur Dari kepala         perpustakaan Pusat Universitas Jember .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>55</b>



## EAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka dan lahir sebagai negara baru. Pernyataan kemerdekaan tersebut sebagai upaya merintis sejarah baru untuk menghantarkan bangsa Indonesia mencapai masyarakat yang bebas menentukan jalan hidup sendiri.

Sebagai negara yang baru berdiri perlu dibentuk lembaga-lembaga pemerintahan seperti layaknya suatu negara merdeka. Segera panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang-sidang sehubungan dengan kepentingan tersebut. Selari setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan keputusan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden beserta wakilnya. Dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 sidang menghasilkan pembentukan kabinet yang terdiri atas 12 departemen masing-masing dipimpin oleh seorang menteri.

Sedangkan sidang PPKI yang diadakan tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan ditetapkan Komite Nasional Indonesia (KNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Berdasarkan hasil sidang PPKI tersebut, pemerintah tidak membentuk tentara, hal ini dikarenakan pemerintah lebih menekankan pada segi diplomasi (Yahya A. Muhaimin, 1982:22). Strategi diplomasi ini dimaksudkan untuk menghindari korban yang tidak berguna yang didasarkan pada pandangan yang pesimis terhadap kekuatan revolusi Indonesia (G. Moedjanto, 1988:157). Pemerintah belum melihat urgensi pembentukan tentara, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan pada dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia cinta damai dan tidak ingin di cap sebagai negara fasis militeris (Yahya A. Muhaimin, 1982:25).

Pada awal kemerdekaan eksistensi Republik Indonesia mengalami cobaan yang berat. Karena kenyataannya Belanda yang telah diusir oleh Jepang di Indonesia mengadakan usaha-usaha untuk menjajah kembali. Pemerintah Belanda masih merasa

berbak untuk menguasai seluruh kepulauan Indonesia (D. Sidik Suraputra, 1991:35). Untuk mencapai tujuan tersebut Belanda membentuk *Nederlands Indies Civil Administration* (NICA), yang berfungsi menerapkan kembali pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia (Marwati Djoened Poesponegoro Dan Nugroho Notosusanto 1984:122).

Kenyataan lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mendaratnya tentara serikat yang tergabung dalam *South East Asian Commond* (SEAC) dibawah Laksamana Lord Louis Mounbatten yang mendarat di Jakarta pada tanggal 16 September 1945 mendesak Jepang untuk mempertahankan status quo (Yahya A. Muhaimin, 1982:23). Keadaan ini mwenjadi panas dengan mendaratnya tentara AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*) di bawah Letjen Sir Philip Christison pada tanggal 29 Desember 1945 yang diboncengi NICA dan secara terang-terangan yang menerapkan kembali penjajahan di Indonesia (G. Moedjanto, 1988:97). Kedatangan Sekutu yang diboncengi NICA menimbulkan perlawanan dari bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 sebelum MPR-DPR membentuk KNIP disertai kekuasaan eksekutif dan ikut menetapkan GBHN, hal ini berarti KNIP berstatus sebagai parlemen yang pekejam sehari-harinya dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP. Konsekuensinya, dengan perubahan status KNIP tersebut, maka harus didirikan partai-partai untuk mewakili suara rakyat. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 1945, BP-KNIP mengusulkan kepada presiden tentang pertanggungjawaban menteri kepada parlemen dengan alasan untuk memberlakukan kedaulatan rakyat. Presiden menerima baik usul tersebut, sehingga terjadilah perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang semula kabinet dipimpin oleh presiden menjadi kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Perubahan kabinet ini diumumkan dalam maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 (Ismail Suny, 1986:29-30). Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis memilih permasalahan yang ditetapkan dalam judul "Diplomasi Sebagai Strategi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Pada Masa Kabinet Syahrir."

Adapun alasan penulis memilih permasalahan yang ditetapkan dalam judul tersebut didasarkan pada petunjuk-petunjuk praktis pemilihan pokok permasalahan (topik), yaitu: (1) topik masih dalam jangkauan penulis, (2) tersedianya bahan-bahan yang diperlukan, (3) topik cukup menarik dan penting untuk diteliti (Sutrisno Hadi, 1990: 51). Selain itu juga didasarkan atas beberapa pertimbangan: (1) bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk menunjukkan kepada generasi penerus akan sikap hati-hati bangsa Indonesia dalam menentukan sikap guna menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan, (2) bahwa topik ini belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi oleh mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, (3) penting diteliti untuk melengkapi koleksi penelitian sejarah khususnya di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Di Universitas Jember, dan (4) bila dikaitkan dengan kompetensi profesional tenaga kependidikan, maka seorang pendidik dapat dikatakan profesional bila memiliki kemampuan ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini seorang pendidik harus mampu menguasai materi pelajaran. Penelitian mengenai perjuangan diplomasi pada masa Sultan Syahrir ini dapat menambah keilmuan bagi penulis bila sudah terjun sebagai guru sejarah.

## 1.2 Definis Operasional Variabel

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai maksud judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan definisi operasional variabel yaitu (1) diplomasi, dan (2) strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

- (1) Diplomasi, menurut A.H. Nasution adalah jalan perundingan antara Indonesia dengan Belanda, yang dilakukan mencapai tujuan, sebagai upaya menghindari peperangan (1962:31). Diplomasi dimaksudkan untuk menghindari korban sia-sia, oleh karenanya jalan ini ditetapkan sebagai strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Adapun perundingan-perundingan yang dilakukan dengan Belanda pada masa Syahrir ini, antara lain: (1) mengadakan perundingan awal dengan Belanda, (2) mengadakan perundingan Hooge Veluwe, (3) mengadakan

perundingan Linggarjati, dan (4) disamping itu juga mengirimkan bantuan beras ke India.

- (2) Strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai sesuatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, sedangkan mempertahankan kemerdekaan adalah mengusahakan supaya bertahan dalam keadaan bebas dari belenggu penjajah, serta berusaha mencegah lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional dari paksaan kekerasan dari pihak lain (Anton M. Moeliono, 1990:557 dan 856).

Sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain, namun tetap menjamin perdamaian dunia, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah : jalan damai yaitu jalan berunding yang dipilih sebagai siasat untuk bertahan dalam keadaan bebas dari belenggu penjajahan oleh pihak lain yang dilakukan pada masa kabinet Sutan Syahrir yang dimulai dari tanggal 14 Nopember 1945 sampai dengan 26 Juni 1947.

### 1.3. Ruang Lingkup Dan Rumusan Permasalahan

#### 1.3.1 Ruang Lingkup

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan, maka ditetapkan ruang lingkup. Penelitian ini mengambil ruang lingkup waktu tahun 1945 sampai 1947 karena pada masa tersebut Syahrir memimpin kabinet parlementer selama tiga periode, sedangkan ruang lingkup tempatnya adalah wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup waktu dan tempat di atas, penulis memfokuskan permasalahan pada pelaksanaan strategi diplomasi dan akibat-akibatnya baik ke dalam maupun keluar.

### 1.3.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan strategi diplomasi dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada masa kabinet Syahrir ?

Dalam penelitian ini penulis tidak mencantumkan hipotesis secara eksplisit karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur yang dalam ilmu sejarah disebut historiorafi yang bersifat deskriptif yaitu sekedar mendeskripsikan atau memaparkan apa adanya data-data yang diambil dari buku-buku yang penulis ambil sebagai acuan. Penelitian semacam ini tidak dituntut merumuskan hipotesis secara eksplisit (Winarno Surachmat, 1990:129). Pemecahannya sekedar mendeskripsikan secara sistematis, obyektif dan logis.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Sejalan dengan pendapat IG. Widja, bahwa tujuan penelitian sejarah adalah berusaha merangkai kemudian mengartikan dengan sebesar-besarnya suatu peristiwa khusus, yaitu kejadian dalam dimensi waktu, tempat dan kondisi tertentu (1988, 23).

Berdasarkan pendapat diatas dan bertolak pada permasalahan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengkaji secara jelas bagaimana pelaksanaan strategi diplomasi dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada masa kabinet Syahrir.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. bagi penulis, dapat melatih diri dalam mengadakan penelitian serta memperluas wawasan materi sejarah Indonesia.
2. bagi para ilmuwan sejarah, dapat menambah wawasan dan memperluas pandangan berfikir demi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. bagi calon guru sejarah, dapat memenuhi salah satu kompetensi guru terutama kompetensi penguasaan materi.
4. bagi alma mater, merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian.



## BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Pelaksanaan Strategi Diplomasi Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan Pada Masa Kabinet Syahrir

Kabinet yang dipimpin oleh Syahrir menunjukkan sikap hati-hati, hal ini tercermin dalam kebijaksanaannya yang bersedia mengadakan diplomasi (A.H. Nantion, 1977b: 67). Pacuk Republik Indonesia waktu itu memperhitungkan, bahwa korban rakyat akan semakin besar bila ditetapkan jalan kekerasan (Adam Malik, 1984: 91).

Pada masa kabinet Syahrir timbul pembagian strategi perjuangan yang tajam yaitu antara perjuangan diplomasi dan revolusi. Strategi diplomasi ini didasarkan pada pandangan yang pesimis terhadap kekuatan revolusi di Indonesia. Diplomasi dianggap sebagai kunci kelangsungan hidup RI, sebaliknya perjuangan revolusi berpangkal pada optimisme terhadap kekuatan nasional dan revolusioner dengan dukungan oleh rakyat luas. Kiranya strategi diplomasi ini lebih mendapat perhatian pemerintah dengan pertimbangan untuk menghindari banyaknya korban sia-sia bila ditetapkan sebagai strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Di dukung pula oleh kenyataan, bahwa Van Mook menyadari kalau Indonesia tidak dapat dihapus hanya dengan kekuatan senjata, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain berunding dengan pemerintah RI mengenai kedudukan Belanda di kemudian hari (D. Sidik Saputra, 1991: 49). Begitu pula pihak Inggris yang ingin segera menyelesaikan tugasnya di Indonesia merasa berkewajiban untuk mempertemukan pihak Indonesia dengan pihak Belanda dalam suatu perundingan, oleh karenanya Inggris menganjurkan bahkan mendesak supaya Belanda berunding dengan Indonesia (Nugroho Notokusanto, 1985: 78). Melalui strategi diplomasi ini sambil mendapatkan simpatik dan dukungan internasional, Syahrir melakukan perundingan dengan Belanda, baik yang dilakukan di Indonesia maupun yang dilakukan di negeri Belanda.

Langkah yang diambil untuk secepatnya menyelesaikan tugasnya di Indonesia mempertemukan pihak Belanda dan pihak Indonesia dalam suatu perundingan dengan

mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa di Indonesia. Sedangkan pihak Indonesia diwakili oleh Syahrir (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1984: 124). Perundingan tersebut sebagai wahana bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan usul dan pernyataan politik.

Pertemuan antara RI, Belanda dan Sekutu yang pertama terjadi pada tanggal 17 Nopember 1945 di markas besar tentara Inggris di Jakarta, namun pertemuan ini tidak memberikan hasil. Perundingan awal antara Indonesia dengan Belanda yang diadakan pada tanggal 10 Februari 1946, dalam perundingan ini Van Mook menyampaikan pernyataan yang terdiri 6 pasal yang isinya mengulangi pidato Ratu Belanda 7 Desember 1942. Atas pernyataan tersebut RI menyampaikan usul balasan pada tanggal 12 Maret 1946 (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1984:124-125). Perundingan awal Indonesia-Belanda ini tidak memberikan hasil, bahkan pernyataan dan usul dari kedua belah pihak bertentangan.

Perundingan ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun juga dilakukan di Negeri Belanda, tepatnya di Hooge Veluwe. Perundingan di Hooge Veluwe juga gagal memperoleh kesepakatan.

Untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia Internasional setelah kegagalan tersebut Syahrir mengirimkan bantuan berus sebagai pelaksanaan diplomasinya di India (D. Sidik Saputra, 1991: 84). Dilanjutkan pula dengan mengadakan Perundingan Linggarjati, yang dilibat dari perundingan ini tampak bahwa strategi yang dijalankan Syahrir berhasil. Namun hubungan Indonesia dengan Belanda tidak bertambah baik, karena terdapat perbedaan penafsiran yang selanjutnya menjadi pangkal perselisihan.

Pada saat pemerintah bertujuan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan dengan jalan berunding dengan Belanda terjadi perpecahan RI dalam dua aliran politik, yaitu antara pemerintah dan oposisi (A.H. Nasution, 1977b: 28).

Kedua ini sangat disayangkan karena perpecahan ini tidak perlu terjadi karena bangsa Indonesia dapat mengerahkan seluruh daya untuk memperoleh pengakuan. Lahirnya

oposisi itu karena ketidakpuasan hasil akan perundingan dengan pihak Belanda yang tidak memperoleh kemajuan (PRS. Mani, 1989: 100).



### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pengertian Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan bidang penelitian. Sebelum memaparkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, maka perlu membahas terlebih dahulu pengertian dari metode penelitian tersebut.

Menurut Winarno Surakhmad, penelitian adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan (1990: 131). Moh. Ali mendefinisikan metode penelitian sebagai suatu cara memperoleh suatu pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi, yang pada dasarnya merupakan metode ilmiah atau scientific method (1985: 21). Pendapat diatas diperkuat oleh Sutrisno Hadi yang memberikan suatu pengertian penelitian sebagai suatu usaha untuk menetapkan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah (1984:4).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengertian metode penelitian adalah teknik-teknik atau cara tertentu untuk menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan atau pemecahan permasalahan dengan cara menghubungkan fakta fakta guna menghasilkan dalil atau hukum melalui metode ilmiah.

Berkaitan dengan pengertian metode penelitian tersebut, Muhammad Nazir mengelompokkan menjadi lima macam, yaitu: (1) metode penelitian sejarah, (2) metode penelitian deskriptif, (3) metode penelitian eksperimental, (4) metode grounded research, dan (5) metode penelitian tindakan (1989: 54).

#### 3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Berkaitan dengan usaha manusia untuk mengungkap peristiwa masa lampau, maka perlu menggunakan metode. Seperti bertugas mengungkap peristiwa masa lampau tersebut, sehingga harus menggunakan metode sejarah. Pengertian metode

sejarah menurut Gilbert J. Gerraghan adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya (Nugroho Notokusanto, 1971: 10-11).

Metode sejarah yang dimaksud sama dengan metode penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (1975:32). Sejalan dengan pendapat tersebut Tatang M. Amirin menjelaskan bahwa penelitian sejarah merupakan kajian logis terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dengan mendasarkan diri pada gambaran tertulis maupun lisan. (1990:110).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian metode penelitian sejarah adalah suatu proses yang harus dilaksanakan oleh sejarawan dalam mencari sumber, menilai secara kritis, menginterpretasikan dan selanjutnya menuangkan ke dalam bentuk tulisan sehingga menjadi kisah sejarah yang logis. Nugroho Notokusanto juga menjelaskan, bahwa pengertian metode penelitian sejarah adalah saran bagi sejarawan untuk melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah (1971:11). adapun penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk yang dikutip dalam Nugroho Notokusanto dibagi menjadi empat langkah, yaitu : (1) heuristik, (2) kritik, (3) intepretasi, (4) historiografi (1971:17).

Heuristik merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti sejarah dalam menyusun cerita sejarah. Kata heuristik berasal dari kata Yunani heuriskein yang berarti menemukan (Nugroho Notokusanto, 1971:18). Dalam hal ini maksudnya adalah menemukan sumber-sumber yang disebutnya sebagai jejak-jejak sejarah. Seanda dengan pendapat tersebut IG. Widja mengatakan bahwa heuristik adalah mencari atau menemukan sumber-sumber sejarah (1988:19). Sedangkan menurut Sutrisno heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah yang akan digunakan untuk penulisan sejarah atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah (1975:45).



Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa heuristik adalah langkah pertama dari penelitian sejarah yang merupakan suatu proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah adalah melakukan kegiatan kritik. Kritik adalah kegiatan menilai, menguji atau menyelidiki jejak-jejak yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, asli dan mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang akan disusun (IG. Widja, 1988:21). Nugroho Notokusanto berpendapat bahwa kritik dimaksudkan untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah yang valid dan reliabel, karena sumber tersebut masih berupa bahan mentah belaka yang harus disusun menjadi fakta sejarah (1971:41). Kritik sumber terbagi menjadi dua tahap yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern bertujuan untuk menilai keaslian suatu sumber, yang dalam prakteknya dapat dilakukan dengan menjawab tiga pertanyaan pokok yang menyangkut sumber yang kita kehendaki, yaitu (1) apakah sumber itu yang kita kehendaki, (2) apakah sumber itu asli atau turunan, (3) apakah sumber itu utuh atau berubah (Nugroho Notokusanto, 1971:20-21). Sedangkan kritik intern dilakukan setelah melakukan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk meneliti kebenaran isi sumber (Winarno Surakhmad, 1990:135). Kritik intern berkaitan dengan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan, dan harus dapat membuktikan bahwa keaslian yang diberikan oleh sumber itu dapat dipercaya, yang dapat diperoleh dengan menilai secara intrinsik terhadap sumber dan membanding-bandingkan keaslian dari berbagai sumber. Langkah ketiga dari metode Sejarah adalah interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah terkumpul (Nugroho Notokusanto, 1971:17). Fakta-fakta sejarah itu perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu rangkaian yang masuk akal dan menunjukkan kesesuaian satu sama yang lainnya (IG. Widja, 1988:23).

Dengan kata lain, rangkaian kata-kata itu harus menunjukkan rangkaian yang bermakna dari berbagai gejala, peristiwa dan gagasan yang tertulis di masa lampau dalam arti tersusun secara sistematis, kronologis dan logis.

Pengertian interpretasi dapat disimpulkan sebagai aktifitas merangkai dan menghubungkan atau mengkaitkan fakta-fakta seobyektif mungkin sehingga dapat mengungkap peristiwa masa lampau secara faktual, rasional, dan kronologis.

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah adalah penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi adalah kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Louis Gottschalk, 1975:32).

Penulisan sejarah ini dilakukan berdasarkan hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah.

Metode yang penulis gunakan dalam penyajian penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah berdasarkan fakta untuk memberikan gambaran tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi, 1991:63). Metode Deskriptif dalam pelaksanaannya tidak hanya mengumpulkan dan menyusun data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data serta membandingkan persamaan dan perbedaan dari fenomena tertentu (Winarno Surakhmad, 1990:139). Jadi Historiografi dengan metode Deskriptif berusaha melukiskan peristiwa secara kronologis, logis dan sistematis dengan merangkai fakta-fakta sejarah sehingga terwujud suatu kisah sejarah yang ilmiah.

### 3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Menurut Nugroho Notosusanto, sumber-sumber sejarah dibagi menjadi tiga macam, yaitu : (1) sumber benda (bangunan, perkakas dan senjata), (2) sumber tertulis (dokumen) dan (3) sumber lisan (hasil wawancara) . (1971:18), sedangkan buku-buku termasuk dalam sumber tertulis atau dokumen yang dapat diperoleh di perpustakaan, dengan demikian sifat penelitian ini adalah studi kepustakaan atau penelitian bibliografis.

Studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data dari berbagai macam atau literatur yang ada di perpustakaan

(Hadari Nasrawi, 1991:39) Hal ini sesuai dengan pendapat Kartini Kartono yang mengatakan bahwa studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data/ informasi dengan bantuan bermacam-macam bahan yang terdapat di perpustakaan berupa naskah, majalah catatan-catatan (1990:33).

Jadi kegiatan mengumpulkan data lebih banyak dilakukan di perpustakaan meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan di tempat lain.

Metode yang penulis gunakan dalam memilih dan menentukan perpustakaan yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Purposive Sampling. Menurut pendapat Moh. Ali, Purposive Sampling adalah teknik pengambilan dan penentuan tempat penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri dan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya oleh peneliti (1987:65-66). Penentuan tempat penelitian itu memang disengaja dengan alasan dan pertimbangan pribadi penulis, maknanya buku-buku sumber yang diperlukan dalam penelitian ini menurut perkiraan dan anggapan penulis tersedia di perpustakaan yang penulis pilih.

Berdasarkan penelitian kepustakaan tersebut, maka penulis mengambil sumber yang berupa buku-buku sumber yang dijadikan acuan, untuk itu penulis menetapkan perpustakaan-perpustakaan yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian, yaitu (1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember, (2) Laboratorium Pendidikan Sejarah (KELAMAS) FKIP Universitas Jember, ditambah juga dengan buku-buku koleksi pribadi sebagai pelengkap.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Berhimpun dengan proses pelaksanaan penelitian sejarah, maka tahapan pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data. Mengingat penelitian yang penulis lakukan bersifat studi kepustakaan, maka metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumenter. Menurut Moh. Ali, metode Dokumenter adalah metode yang digunakan untuk mencari sumber (data), yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan majalah, sedangkan



sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen (1985:41-42). Pendapat ini di dukung oleh Hadari Nawawi, yang mengatakan bahwa metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip tentang pendapat-pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dll yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (1991:133).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode dokumenter adalah metode pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis mengenai bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber pokok dan sumber penunjang. Sumber pokok adalah sumber yang paling banyak dipakai sebagai acuan dalam penelitian, sedangkan sumber penunjang adalah sumber yang berfungsi melengkapi sumber yang penulis ambil dari sumber pokok.

### 3.5 Metode Analisis Data

Setelah berhasil mengumpulkan data, maka langkah berikutnya adalah mengadakan analisis data yaitu melakukan aktifitas kritik dan interpretasi. Berkaitan dengan penggunaan metode Sejarah sebagai alat bantu untuk merekonstruksi masa lampau secara ilmiah, diperlukan kemampuan berfikir logis dan imajinatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode filosofik.

Metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar tentang hakekat sesuatu, baik menggunakan pola berpikir aliran filsafat tertentu, maupun dalam bentuk analisis sistematis berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif, fenomenologis, dan lain-lain (Hadari Nawawi, 1991:62). Metode filosofik ini sesuai sekali dipakai dalam penelitian sejarah sebab tidak tepat bila Sejarah hanya semata-mata bertujuan untuk menciptakan suatu cerita, tetapi yang lebih pokok adalah membuat uraian yang memakai penalaran logis dan kritis (Sartono Kartodirdjo, 1992:23).

Berpijak dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa metode filosofik adalah cara yang digunakan dengan menggunakan cara berpikir yang teratur menurut urutan yang tepat sehingga menghasilkan pengetahuan yang mendekati kebenaran dan masuk akal. Dalam menerapkan metode filosofik tersebut penulis menggunakan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif, yang penggunaannya dilakukan secara serentak tidak secara sendiri-sendiri atau secara terpisah.

#### a. Teknik Logika Komparatif

Teknik logika komparatif adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena yang menimbulkan terjadinya peristiwa sejarah (Moh. Ali, 1985:123). Sedangkan Menurut Winarno Sarakmad, studi komparatif digunakan dalam suatu penelitian untuk meneliti hubungan lebih dari satu fenomena yang sejenis dengan menunukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari suatu peristiwa (1990:136). Berdasarkan pendapat diatas, maka disimpulkan, bahwa teknik logika komparatif adalah proses membanding-bandingkan data yang satu dengan yang lain untuk melukiskan fakta atau peristiwa sejarah yang dapat dirangkai menjadi kisah sejarah yang masuk akal dan obyektif.

#### b. Teknik Logika Induktif

Teknik logika induktif adalah cara berpikir yang melandaskan pada pengetahuan-pengetahuan khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari faktor-faktor yang khusus dan kongkret itu dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Sutrisno hudi, 1984:18). Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa logika induktif adalah cara berpikir dari pengetahuan atau informasi yang bersifat khusus untuk disimpulkan menjadi fakta yang bersifat umum dan obyektif.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam bab I, tinjauan kepustakaan dalam bab II, dan pembahasan dalam bab IV, maka penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa strategi diplomasi yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Syahrir meliputi: (1) mengadakan perundingan awal dengan Belanda dengan harapan agar pihak Indonesia dengan pihak Belanda dapat saling mendekati, (2) mengadakan perundingan di Hooge Veluwe pada tanggal 14 April 1946, namun perundingan ini mengalami kegagalan karena Belanda menginginkan pulau Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, (3) mengadakan perundingan Linggarjati pada tanggal 10 Nopember 1946, dan (4) mengadakan pengiriman beras ke India untuk membantu kelaparan dan menunjukkan kiprah Indonesia kepada negara tetangga dan dunia internasional.

### 5.2 Saran-saran

Dari kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. bagi mahasiswa calon guru sejarah, akan lebih baik jika mendalami materi sejarah sebagai bekal menjadi guru sejarah yang profesional dengan cara mengadakan penelitian sejarah.
2. bagi para sejarawan, akan lebih baik jika penelitian mengenai Sejarah Nasional Indonesia terus ditingkatkan, sehingga dapat diketahui secara optimal mengenai sejarah bangsa sendiri untuk lebih mempertebal rasa kebangsaan dalam menghadapi era globalisasi.
3. bagi para dosen, agar terus mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian sejarah sebaik mungkin untuk menghasilkan calon guru sejarah yang berkualitas, dan menambah kepustakaan sebagai tanda bukti pelaksanaan Dharma penelitian yang menjadi salah satu tugas Perguruan Tinggi.

4. bagi generasi penerus, sebaiknya terus mempelajari sejarah, khususnya Sejarah Nasional Indonesia agar dapat mengetahui perjuangan bangsa untuk dapat melanjutkan perjuangan tersebut pada masa depan.



KEPUSTAKAAN

- Adam Malik, 1984, Mengsbedi Republik Jilid II: Angkatan 45, Inti Idayu Press, Jakarta. \*)
- A.H Nasution, 1962, Tentara Nasional Indonesia I, Ganaco, Jakarta.
- , 1964, Tentara Nasional Indonesia II, Ganaco, Jakarta.
- , 1977a, Sekitar Perang Kemerdekaan II, Angkasa, Bandung. \*)
- , 1977b, Sekitar Perang Kemerdekaan III, Angkasa, Bandung. \*)
- Anonim, 1981, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Anton M. Moeliono, dkk., 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Arief Priyadi, 1986, Wawancara Dengan Sayuti Melik, Centre For Strategic And International Studies, Jakarta.
- Ariwiyadi, 1985, Ikhtisar Sejarah Republik Indonesia, Pusat Sejarah ABRI-Dephankam, Jakarta.
- Deliar Noer, 1991, Moh. Hatta Biografi Politik, Lembaga Penelitian Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta.
- D. Sidik Suraputra, 1991, Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta. \*)
- G. Moedjanto, 1988, Indonesia Abad ke-20 Jilid I, Kanisius, Yogyakarta. \*)
- Gottschalk, Louis 1975, Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- IG. Widja, 1988, Pengantar Ilmu Sejarah, Satya Wacana, Semarang.
- Ismail Suny, 1986, Pengembangan Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta.
- Joenarto, 1990, Sejarah Kotatanogaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Bandung.

- Kartini Kartono, 1990, Pengantar Studi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung.
- Mani, PRS. 1989, Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah, Graffiti Pustaka Utama, Jakarta. \*)
- Marwati Djoened Poesponogoro dan Nugroho Notokusanto (Ed.), 1984, Sejarah Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka, Jakarta. \*)
- Moh. Ali, 1985, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung.
- Moh Usardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.
- M. Said, 1991, Terjemah Al Qur'an Al Karim, Al Ma'arif, Bandung.
- Nugroho Notokusanto, 1971, Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah, Pusat Sedjarah ABEI-Dephankam, Djakarta.
- Ricklefs, M.C. 1989, Sejarah Indonesia Modern, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta. \*)
- Sartono Kartodirdjo, 1991, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Metodologi Sejarah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suffri Yusuf, 1989, Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sundhaussen, UIF 1988, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Terjemahan Hasan Basri, Lembaga Penelitian Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta. \*)
- Sutrasno, 1975, Sejarah Dan Ilmu Pengetahuan (History And Science), Pradnya Parmitha, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1990, Metode Research I, Andy Offset, Yogyakarta.
- Tatang M. Amirin, 1990, Merencanakan Rencana Penelitian, Rajawali Press, Jakarta.
- Wismno Surahmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik, Tarnito, Bandung.
- Wolf, Charles 1990, Sutan Syahrir Renungan Dan Perjuangan, Terjemahan HB. Jassin, Jambatan, Jakarta.

Yahya A. Muhaimin, 1982, Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta. \*)

Keterangan:

\*) Buku Pokok



**MATRIK PENELITIAN**

Lampiran 1 :

Topik	Judul	Jenis/ Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
Sejarah Indonesia Modern	Diplomasi Sebagai Strategi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Pada Masa Kabinet Syahrir	Jenis : Penelitian Historik Sifat : Penelitian Kepustakaan	Bagaimana Pelaksanaan Diplomasi Dalam Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan Pada Masa Kabinet Syahrir	Buku-buku Pokok : 11 buah. Buku-buku Penunjang : 3 buah...	1. Metode Penelitian : Purposive Sampling 2. Metode Pengumpulan Data: Dokumenter. 3. Metode Analisis Data menggunakan metode filosofik dengan teknik : a. Logika Komparatif b. Logika Induktif.



Lampiran 2 :

**PASAL - PASAL PERUNDINGAN LINGGAIJATI**

(D. Sidiq Suraputra, 1991: 192-196, dikutip dari Mohammad Roem 1977: 59-61)

**Pasal 1**

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra

Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerjasama antara antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu, supaya selanjutnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuk daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

**Pasal 2**

Pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia berjanjisan untuk menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi yang berdasarkan perserikatan, dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

**Pasal 3**

Negara Indonesia Serikat ini akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan ketentuan bahwa, jika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah itu juga di lain menurut aturan dan ketentuan, tidak atau masih belum bisa masuk ke dalam Persekutuan Negara Indonesia Serikat, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu terhadap Kerajaan Belanda.

## Pasal 4

(1). Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Boerneo dan Timur Besar, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, untuk menyatakan kehendaknya ke dalam Negara Republik Indonesia itu sudah diatur dengan cara lain.

(2). Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat ke (1) pasal ini, Negara Republik Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

## Pasal 5

(1). Undang-Undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara yang akan didirikan oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil Sekutu lainnya lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Republik Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.

(2). Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam daerah kekuasaan Republik itu oleh golongan-golongan penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung jawab daripada pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia masing-masing.

## Pasal 6

(1). Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada negeri Belanda dan Indonesia akan bekerja bersama untuk membentuk persekutuan Belanda-Indonesia, yang dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda yang meliputi negeri Belanda, Hindia Belanda,

Suriname dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persetujuan itu, yang terdiri pada satu pihak daripada Kerajaan Belanda yang meliputi negeri Belanda, Suriname, dan Curacao, dan pada pihak lainnya daripada Negara Indonesia Serikat.

(2). Yang tersebut diatas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan yang lainnya.

#### Pasal 7

(1). Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan yang tersebut di dalam pasal diatas ini, persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2). Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat; mungkin juga oleh Majelis-majelis Perwakilan Rakyat negara itu.

(3). Adapun yang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan, dan seberapa perlu keuangan, serta juga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

#### Pasal 8

Dipucuk persekutuan Belanda-Indonesia itu duduk raja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan persekutuan itu atas nama Baginda Raja.

#### Pasal 9

Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda dan kepentingan-kepentingan Kerajaan Belanda di Indonesia, maka pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat komiseris luhur

## Pasal 10

Anggar-anggar persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain akan mengandung ketentuan-ketentuan tentang

- a. pertanggung-jawaban hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewajiban-kewajiban yang satu kepada yang lain;
- b. hal kewarganegaraan untuk warga negara Belanda dan Warga Negara Indonesia, masing-masing di daerah lainnya;
- c. aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat-alat kelengkapan persekutuan itu tidak dapat dicapai sempurna;
- d. aturan cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak akan cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;
- e. pertanggung-jawaban dalam kedua bagian persekutuan itu akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan yang dimaksudkan juga oleh piagam persekutuan bangsa-bangsa.

## Pasal 11

(1). Anggar-anggar itu akan direvisikan kelak oleh suatu permusyawaratan antara waki-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.

(2). Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh Majelis-majelis Perwakilan rakyat kedua belah pihak masing-masingnya.

## Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan supaya terwujudnya Negara Indonesia Serikat dan persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.

## Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan agar supaya, setelah terbentuknya persekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak-hak orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang dibekukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, yang lagi berada di dalam daerah kekuasaannya *de facto*. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

## Pasal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara yang dirikakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan supaya, dengan segera dilakukan aturan-aturan Undang-Undang, agar supaya sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia serikat dan persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah persetujuan ini menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan bala tentaranya masing-masing.

Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang seberapa dan lambat-cepatnya melakukan pengurangan itu; demikian juga tentang kerja bersama dalam hal ketenteraan.

Pasal 17

(1). Untuk kerja bersama yang dimakrudkan dalam persetujuan itu antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri daripada delegasi-delegasi yang ditunjukkan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnya, dengan sebuah sekretariat bersama.

(2). Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bila ada tumbuh perselisihan berhubungan dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, maka menyerahkan keputusan kepada arbitrase. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, yang diangkat dengan semufakat antara dua pihak delegasi itu, atau, jika tidak berhasil semufakat itu, diangkat oleh Ketua Dewan pengadilan Internasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dikarangkan dalam Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia. Kedua-duanya naskah itu sama kekuatannya.

Jakarta, 15 November 1946



# UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kallimantan III/24 PO. BOX 198 Jember 68121  
Telp. (0331) 83860, 88261 Fax. (0331) 88261  
E-mail : lib-unej@indo.net.id

## SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

NOMOR : 429/PT. 32.116/S 198

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Kurniati Agustineh  
NIM : 9102105235  
Jur/Program : Pend. IPS/Pend. Sejarah  
Fakultas : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Angkatan : 1991

Terhitung mulai bulan Juni 1996 sampai bulan Juni 1997 telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referen	R. OR	R. Skripsi
12-06-1996	x	-	-	-
24-06-1996	x	-	-	-
16-07-1996	-	x	-	-
05-08-1996	-	x	-	-
12-08-1996	x	-	-	-
09-10-1996	-	-	x	-
10-12-1996	x	-	-	-
27-01-1997	-	-	-	x
30-05-1997	-	-	-	x
02-06-1997	-	-	-	x
09-06-1997	x	-	-	-

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 1 Desember 1998

A.n. Kepala  
Kebag. TU

*Budiwati*  
Dr. Budiwati, S.Sos.  
NIP. 130 683 181

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas**

Nama : Kurniati Agustinah  
NIM : 9102105235  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Agustus 1972  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Sardiman Sastromiharjo  
Nama Ibu : Siti Fatmahan  
Alamat : Sepanjang Wetan No. 44 Glenmore  
Banyuwangi

**B. Pendidikan**

Lulus SDN Sepanjang II Glenmore tahun 1984  
Lulus SMP Negeri I Glenmore tahun 1987  
Lulus SMA Negeri II Banyuwangi tahun 1990